

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendasari pelaksanaan otonomi daerah, diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur daerah pada penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut menimbulkan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dituntutnya daerah untuk membiayai kegiatan pembangunannya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada (Sjamsuddin, 2006, h.113). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan yang ada guna meningkatkan PAD yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan

Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan, baik pada saat sekarang maupun pada periode masa yang akan datang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan juga diperlukan pada

tingkat regional (wilayah). Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama (Sjafrizal, 2008, h.154).

Pembangunan yang difokuskan pada pengembangan wilayah harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal. Sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Menurut Oktaviani dan Sardjito (2012, h.2) pengembangan wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal adalah pengembangan wilayah yang menggunakan pendekatan ekonomi lokal atau yang biasa disebut Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*), yaitu proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan

Menurut J Blakely (1994) yang dikutip oleh Oktaviani dan Sardjito (2012, h.3), pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Dimana pengembangan ekonomi berbasis lokal pada dasarnya adalah proses dimana pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pengembangan potensi daerah menuntut pemerintah daerah saat ini untuk melakukan pembaharuan diberbagai sektor sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya. Inovasi adalah *the specific tool of entrepreneurs that is utilised to exploit change as an opportunity for a different business or a different service*. Dengan demikian inovasi dapat dimaknai sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru yang memberikan nilai signifikan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat (Sjamsuddin, 2006, h.21). Jadi, pengembangan potensi daerah juga menuntut adanya pengembangan aparatur lembaga pemerintahan sehingga aparatur dapat berinovasi dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Pengembangan aparatur lembaga pemerintahan atau organisasi publik membutuhkan pendekatan yang terpadu dan dapat membutuhkan waktu yang sangat lama, karena berbagai faktor yang kompleks yang melatarbelakangi aparatur pemerintahan, baik dari segi nilai, kualifikasi maupun lingkungan yang melingkupi. Konsekuensi dari responsivitas yang kurang memadai adalah ketertinggalan lembaga publik, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan dari percepatan-percepatan di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan dan investasi yang justru merupakan inti dari tugas pemerintahan baru.

Dahulu peran organisasi publik dan pegawai pemerintahan lebih diasumsikan untuk melayani masyarakat (*public service*), dengan sedikit meninggalkan orientasi input. Namun sekarang pemerintah daerah disyaratkan

untuk memikirkan input-input dalam rangka memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan semua sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan sumber daya manusia yang ada. Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan, birokrasi yang mempunyai jiwa *entrepreneur* (Winarno, 2004, h.9).

Sebagaimana David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku *Reinventing Government* mengatakan pemerintahan di era yang akan datang dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan seorang *public service* yang memiliki jiwa *entrepreneur*, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada. Istilah birokrasi *entrepreneur* atau *reinventing government* dikenal karena adanya perubahan paradigma pada administrasi publik (Said, 1996, h.6). Masa ini terjadi pada masa 1970 dimana administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara yang merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik

Jiwa *entrepreneurship* adalah jiwa di mana individu atau kelompok dalam organisasi dapat mengelola sumber-sumber yang berupa kesempatan, tantangan menjadi hasil. Menurut Said (1996, h.4), *entrepreneurship* adalah kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian termasuk keberanian untuk mengambil resiko usaha dan meminimalisasi resiko tersebut menjadi keuntungan. John G. Burch menterjemahkan *entrepreneurship* sebagai aktifitas seorang wiraswasta, diambil dari istilah dalam bahasa Prancis, *entrepreneure* yang

berarti mengambil peran, mengambil suatu kesempatan, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi

Pada saat ini, *entrepreneurship* menjadi kebutuhan bagi para personel, dikarenakan hampir semua jenis organisasi besar berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output organisasi yang diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip organisasi, efektifitas dan produktifitas. Beberapa asas *entrepreneurship* antara lain kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif, bekerja secara teliti, tekun dan produktif. Jiwa-jiwa inilah yang dapat mengantarkan individu ke dalam pengambilan peran dalam berkarya dan mengendalikan sumber-sumber yang dimilikinya (*resources*) ke dalam proses yang produktif. Dulu, jiwa *entrepreneurship* ini lebih banyak dibutuhkan oleh kalangan pengusaha atau bisnismen, dan tidak untuk organisasi dan pegawai publik seperti pegawai pemerintahan. Namun dalam perkembangan yang sekarang ini sektor pemerintahan (seharusnya) juga mengambil peran aktif dalam pengelolaan bidang-bidang bisnis baik secara langsung maupun melalui kerja sama mereka dengan para pengusaha (Said, 1996, h.5). Dan bahkan adalah sebuah tugas bagi para lembaga pemerintahan atau birokrat yang negaranya mempunyai sumber daya alam yang melimpah agar dioptimalisasikan secara efisien untuk kemakmuran masyarakat.

Di Indonesia, baru beberapa Provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan sistem birokrasi *entrepreneur* salah satunya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan agar birokrasi tidak hanya bekerja dengan mengandalkan anggaran APBD saja, akan tetapi para birokrat diberdayakan untuk harus berpikir

entrepreneur agar dapat menghasilkan anggaran. Untuk itu, para birokrat dituntut berpikir “*out of the box*” dan berinovasi dengan memanfaatkan potensi sekitar yang ada sebagai peluang untuk mempromosikan potensi daerah.

Contoh provinsi yang mengimplementasikan birokrasi *entrepreneur* juga yaitu provinsi Gorontalo. Sjamsuddin (2006, h.32) berpendapat bahwa kekuatan ekonomi Gorontalo terletak pada dua sektor yaitu pertanian dan perikanan. Pengembangan pertanian difokuskan pada budidaya Jagung karena merupakan tanaman yang secara tradisional sudah dikenal dan dibudidayakan. *Maize economy* adalah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Gorontalo. Melalui *maize economy* dibangun *interlinkage* antara sektor hulu dan hilir untuk mengembangkan nilai tambah komoditas jagung.

Pembangunan yang dilakukan pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan pembangunan daerah harus fokus pada keunggulan daerahnya masing-masing. Gorontalo adalah salah satu contoh provinsi yang menggunakan potensi lokal dalam sektor pertanian dan perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonominya, hal tersebut dikarenakan oleh karakteristik geografis dan alam yang terdapat di Gorontalo. Selain pengembangan pertanian dan perikanan, di Indonesia juga terdapat pengembangan pada sektor pariwisata. Menurut Yoeti (1997, h.6), pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan

wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis.

Sebagai contoh adalah Kota Batu yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kota Wisata Batu (KWB). Wilayah Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah dan sejuk sehingga berpotensi sebagai daerah wisata. Kota yang banyak memiliki potensi wisatanya ini, melibatkan masyarakat dalam membangun daerahnya melalui pembentukan desa wisata. Menurut Muhammad (2013), lahirnya desa wisata merupakan program khusus untuk menjadikan potensi pertanian kota Batu sebagai salah satu obyek wisata. Program Desa Wisata dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Desa sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendongkrak desa wisata yaitu dengan menggelar wisata bertajuk *Batu Travel Mart* atau *BTM*, yaitu sebuah ajang untuk mempertemukan para pelaku industri wisata atau seller dengan pemilik agen perjalanan wisata atau buyer guna terjalinnya kerjasama antar kedua pihak di bidang pariwisata.

Keberhasilan Provinsi Gorontalo dan Kota Batu tidak terlepas dari promosi yang dilakukan Pemerintah setempatnya. Hermawan (2012, h.38) berpendapat promosi sebagai kegiatan yang merupakan salah satu komponen prioritas penting dari kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang

akan menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian. Banyak yang mengatakan bahwa kegiatan promosi identik dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Namun dana bukanlah segala-galanya. Dana yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi yang lebih cerdas dan tepat

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang penuh dengan potensi pariwisata seperti Kota Batu. Di Banyuwangi banyak tempat-tempat wisata baik wisata alam, wisata budaya dan wisata religi. Wisata budaya dibuktikan dengan keanekaragaman seni dan budaya, serta adat tradisi yang dimiliki Banyuwangi. Salah satu kesenian khas Banyuwangi adalah Tarian Gandrung , yaitu tarian khas untuk menyambut para tamu. Tarian ini telah dijadikan maskot pariwisata Banyuwangi. Oleh karna itu, tidak berlebihan jika Banyuwangi disebut sebagai *“The Sunrise of Java”* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Selain itu, Banyuwangi adalah kabupaten yang memiliki letak sangat strategis dikarenakan daerah tersebut dikelilingi pantai dan juga hutan, dan yang paling diketahui bahwa Banyuwangi berdekatan dengan Pulau Bali. Untuk mencapai Pulau Bali dengan jalur darat, para wisatawan haruslah melewati Banyuwangi dan menyebrang dengan menggunakan kapal ferri di pelabuhan ketapang. Namun, jauh hari sebelumnya pemerintah Banyuwangi kurang memanfaatkan letak strategis tersebut untuk melakukan promosi potensi daerah yang ada. Pemerintah hanya melakukan promosi dalam pekan-pekan pameran yang dirasa kurang memberikan dampak yang signifikan.

Menyadari banyaknya potensi daerah yang harus dikembangkan dan dipromosikan untuk mendongkrak pariwisata, pemerintah Banyuwangi dibawah

kepemimpinan Bupati baru yaitu H. Abdullah Azwar Anas melakukan kegiatan *inovatif* dalam rangka mempromosikan potensi daerah yang ada. Pihak pemerintah daerah Banyuwangi berinisiatif menggunakan kesempatan letak strategis Banyuwangi dengan Bali untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Banyuwangi. Jadi, para wisatawan pun dimanfaatkan tidak hanya sekedar “numpang lewat” saja. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga bekerja sama dengan beberapa provider telepon seluler untuk promosi. Kerja sama tersebut memungkinkan setiap wisatawan akan mendapat ucapan selamat datang ketika masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Isi pesan melalui ponsel tersebut berisi lokasi dan peta wisata serta berbagai informasi di dalamnya. Dengan begitu akan sangat memudahkan wisatawan untuk datang dan menikmati fasilitas dan informasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, pemerintah pun sering mengundang para wartawan dan pihak media massa untuk berkunjung di Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengajak para tamuya tersebut untuk berkeliling di Kabupaten Banyuwangi dengan menunjukkan tempat-tempat wisata, budaya serta adat istiadat yang ada disana. Hal tersebut adalah salah satu kegiatan promosi juga, dikarenakan bukan tidak mungkin jika para wartawan dan media massa tersebut ingin menuliskan tentang potensi-potensi yang ada di Banyuwangi dan memuatnya dalam media massa seperti majalah, internet dan televisi. Dengan seperti itu, maka akan sangat memungkinkan sekali untuk Kabupaten Banyuwangi dapat dikenal oleh khalayak luas. Tak hanya itu saja, kegiatan-kegiatan event yang

terangkum dalam “Banyuwangi Festival” pun merupakan usaha promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah Banyuwangi yang selalu menjadi agenda rutin. Hal itu sesuai dengan tekad Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin. Banyuwangi festival merupakan event-event yang dilakukan dengan mengangkat seni budaya, adat istiadat serta tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan “Banyuwangi Festival” ini dimanajemen oleh Satuan Kerja Pegawai Daerah (SKPD) melalui dinas-dinas yang terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu, kegiatan event yang sangat dikenal dan banyak diminati masyarakat adalah *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*, yaitu suatu event budaya yang diharapkan mampu menjembatani modernisasi seni budaya lokal yang selama ini tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi menjadi sebuah event dalam bentuk parade berskala Internasional tanpa harus merubah nilai-nilai yang sudah berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat baik spirit maupun filosofinya. *BEC* merupakan bentuk dari transformasi budaya adat Banyuwangi yang dikemas dalam bentuk yang lebih kreatif tanpa merubah seni tradisi yang ada dalam masyarakat Banyuwangi.

BEC juga merupakan wadah pemacu kreatifitas para birokrat dan generasi muda untuk menuangkan gagasan-gagasan unik dan menarik serta memvisualisasi gagasan yang berlatar etnik dan tradisi tersebut ke dalam bentuk dan kemasan

artistik yang spektakuler sebagai apresiasi terhadap nilai budaya lokal sehingga dapat memiliki daya tarik tersendiri dalam meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal maupun sebagai sajian yang sangat menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi.

Gaung *BEC* pun tidak hanya terasa di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga terdengar di luar daerah di seluruh Indonesia, bahkan hingga Luar Negeri. Karnaval disepanjang jalan protokol Kabupaten Banyuwangi itu mampu menyedot antusias ribuan penonton tidak hanya dari Banyuwangi saja, bahkan warga dari luar Banyuwangi dan para wisatawan lainnya. Multiplayer efek yang ditimbulkan juga luar biasa besar, karena *BEC* mampu menjadi pemicu munculnya kegiatan ekonomi kreatif di kalangan masyarakat. *BEC* pun di manajemen oleh para birokrat Kabupaten Banyuwangi sendiri, dan dinas yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dikarenakan *BEC* merupakan bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang diberikan Bupati Banyuwangi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai *finishing*, para birokrat berperan aktif dalam *BEC* khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibantu oleh seniman dan budayawan serta pihak sponsor yang memberikan bantuan dan dukungan berupa fasilitas. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Tujuan dari itu adalah untuk menciptakan birokrasi yang *enterpreunership*. Dimana para birokrat dituntut untuk berpikir kreatif, *out of the box*, dan dapat menjalin *relation* yang baik dengan para pengusaha.

Salah satu alasan mengapa birokrasi yang *entrepreneurship* ini dilakukan karena adanya permasalahan masih terbatasnya tingkat pemasaran atau promosi yang dilakukan. Kurang efektifnya strategi-strategi dalam melakukan promosi, bentuk promosi yang kurang menarik juga sasaran promosi yang masih kurang tepat. Dimana promosi yang dilakukan sebelum adanya inovasi, tidak begitu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pariwisata dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Maka, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian *entrepreneurship* yang dilakukan para birokrat Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosikan potensi daerah melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)* dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai tempat penelitian dan akan melakukan penelitian dengan judul **“Birokrasi *Entrepreneur* dalam Mempromosikan Potensi Daerah (Studi pada Festival *Banyuwangi Ethno Carnival* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada suatu penelitian adalah untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah serta agar dapat lebih terarah dan jelas sehingga dapat diperoleh langkah-langkah pemecahan yang efektif. Adapun perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan faktor pendukung dan penghambat birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat melatih dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan beberapa teori yang didapatkan di perkuliahan. Diharapkan dari penelitian ini, pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan birokrasi *entrepreneur* untuk mempromosikan potensi daerah melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*. Dengan demikian hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat kebijakan untuk kemajuan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun laporan penelitian ini, penulis membagi laporan penelitian menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau dari sudut akademis maupun dari sudut praktis, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan (analisis) data, situs penelitian dan proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil analisis mendalam terhadap data sekunder dan primer yang diperoleh dalam penelitian mengenai birokrasi *entrepreneur* dalam mempromosikan potensi daerah melalui festival *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)* dengan menggunakan teori-teori yang terkait sebagai alat untuk menganalisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan permasalahan disertai rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.